

**PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA ALOKASI UMUM, DANA
ALOKASI KHUSUS DAN BELANJA MODAL TERHADAP
KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
KAB/KOTA SE SUMATERA BARAT**

ARTIKEL



Oleh :

FAUZAN JAUHAR

2009/13055

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
2016**

HALAMAN PENGESAHAN ARTIKEL

**PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA ALOKASI UMUM,
DANA ALOKASI KHUSUS DAN BELANJA MODAL TERHADAP KINERJA
KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KAB/KOTA SE SUMATERA BARAT**

Oleh :

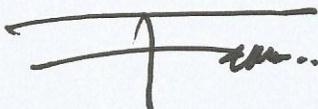
FAUZAN JAUHAR
13055/2009

Artikel ini disusun berdasarkan skripsi untuk persyaratan wisuda periode September 2016 dan telah diperiksa/disetujui oleh kedua pembimbing

Padang, agustus 2016

Disetujui Oleh:

Pembimbing I



Fefri Indra Arza, SE, M.Sc, Ak
NIP : 19730213 199903 1 003

Pembimbing II



Erly Mulyani SE, M.Si, Ak
NIP. 19781204 200801 2 011

PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA ALOKASI UMUM, DANA ALOKASI KHUSUS DAN BELANJA MODAL TERHADAP KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KAB/KOTA SE SUMATERA BARAT

Fauzan Jauhar

Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang
Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus Air Tawar Padang
Email: fauzanjauhar91@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji: 1) Pengaruh pendapatan asli daerah (PAD) diukur dengan nilai realisasi PAD terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah yang diukur dengan efektifitas PAD, 2) Dana alokasi umum (DAU) diukur dengan nilai realisasi DAU terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah yang diukur dengan efektifitas PAD, 3) Dana alokasi Khusus (DAK) diukur dengan nilai realisasi DAK terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah yang diukur dengan efektifitas PAD, 3) Belanja Modal diukur dengan nilai realisasi belanja modal terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah yang diukur dengan efektifitas PAD

Jenis penelitian ini digolongkan pada penelitian yang bersifat kausatif. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan seluruh kota/kabupaten di Sumatera Barat. Pemilihan sampel dengan total sampling, yaitu seluruh populasi dijadikan sampel. Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder. Teknik pengumpulan data dengan teknik dokumentasi. Analisis yang digunakan adalah *moderated regression analysis*.

Hasil pengujian menunjukkan bahwa: 1) Pendapatan asli daerah (X_1) berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah (Y) dengan nilai signifikansi 0.000 lebih kecil dari alpha 0.05 atau nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu $14.953 > 1.9866$ serta nilai β positif, 2) Dana alokasi umum berpengaruh tidak signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah (Y) dengan signifikansi 0.943 lebih besar dari alpha 0,05 atau nilai $t_{hitung} < t_{tabel}$ yaitu $0.070 < 1.9866$, nilai β positif. 3) Dana alokasi khusus (X_3) berpengaruh signifikan negatif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah (Y) dengan nilai signifikansi 0.000 lebih kecil dari alpha 0.05 atau nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu $3.761 > 1.9866$ serta nilai β negatif. 4) Belanja modal (X_4) tidak signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah (Y) dengan nilai signifikansi 0.225 lebih besar dari alpha 0.05 atau nilai $t_{hitung} < t_{tabel}$ yaitu $1.223 < 1.9866$ serta nilai β negatif

Bagi penelitian selanjutnya hendaknya menambah variable lain yang mempengaruhi kualitas laba diantaranya prinsip akuntansi dan tingkat risiko.

Kata Kunci : Kinerja Keuangan Daerah, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Belanja Modal

ABSTRACT

This study aimed to test: 1) Influence of local revenue (PAD) is measured by the value of the realization of PAD on the financial performance of local governments as measured by the effectiveness of PAD, 2) Fund (DAU) is measured by the value of the realization of the DAU to the financial performance of local government measured by the effectiveness of PAD, 3) Special allocation Fund (DAK) measured by DAK realizable value on the financial performance of local governments as measured by the effectiveness of PAD, 3) capital expenditure is measured by the value of capital expenditures on the financial performance of local governments as measured by the effectiveness of PAD

This type of research is classified at the research be causative. The population in this study are companies all cities / regencies in West Sumatra. Selection of the sample with a total sampling, ie the entire population sampled. The data used in this research is secondary data. Data collection techniques with documentation techniques. The analysis used was moderated regression analysis.

The results show that: 1) Own-source revenue (X_1) positive significant effect on the financial performance of local governments (Y) with a significance value of 0.000 is smaller than alpha 0:05 or $t_{count} > t_{table}$ is $14.953 > 1.9866$ as well as the value of β is positive, 2) general allocation funds not significant effect on the financial performance of local governments (Y) with 0.943 significance is greater than the value of alpha 0,05 atau $t < t_{table}$ is $0.070 < 1.9866$, positive β value. 3) special allocation fund (X_3) significant negative effect on the financial performance of local governments (Y) with a significance value of 0.000 is smaller than alpha 0:05 or $t_{count} > t_{table}$ is $3,761 > 1.9866$ and β negative value. 4) Capital expenditures (X_4) is not significant to the financial performance of local governments (Y) with a significance value greater than alpha 0225 0:05 or value $t < t_{table}$ is $1,223 < 1.9866$ as well as the negative β value

For further research should add other variables that affect the quality of earnings including accounting principles and the level of risk.

Kata Kunci : Regional Financial Performance , PAD, General Allocation Fund , Special Allocation Fund , Capital Expenditure

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Berakhirnya kekuasaan orde baru pada tahun 1998 menyebabkan banyak perubahan yang terjadi di pemerintahan Indonesia. Perubahan tidak terjadi di pusat tetapi juga di daerah. Setelah era reformasi, sistem pemerintahan yang awalnya bersifat terpusat mulai mengalami desentralisasi. Hal ini ditandai dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah. Peraturan tersebut menjadi landasan bagi pemberian otonomi daerah yang semakin besar kepada daerah. Akibat dari adanya otonomi daerah dituntutnya pemerintah daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

Dalam upaya mendukung pelaksanaan pembangunan nasional, pemerintah memberikan kesempatan untuk menyelenggarakan otonomi daerah dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang memberikan hak dan kewajiban kepada Pemerintah Daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai

dengan peraturan perundang-undangan.

Ciri utama yang menunjukkan bahwa suatu daerah merupakan daerah otonomi terletak pada kemampuan keuangan daerah, artinya daerah otonomi harus memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber keuangan sendiri, sedangkan ketergantungan pada pemerintah pusat diusahakan seminimal mungkin. Perimbangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dapat dikatakan ideal apabila setiap tingkat pemerintahan dapat mengatur keuangannya untuk membiayai tugas dan wewenang daerahnya masing-masing.

Salah satu kriteria penting untuk mengetahui secara nyata kemampuan daerah dalam mengatur rumah tangganya adalah kemampuan daerah dalam bidang keuangan daerah. Kinerja keuangan pemerintah daerah adalah kemampuan suatu daerah untuk menggali dan mengelola sumber-sumber keuangan asli daerah dalam memenuhi kebutuhannya guna mendukung berjalannya sistem pemerintahan, pelayanan kepada masyarakat dan pembangunan daerahnya dengan tidak tergantung sepenuhnya kepada pemerintah pusat dan mempunyai keleluasaan dalam menggunakan dana-dana untuk kepentingan masyarakat daerah dalam batas-batas yang ditentukan peraturan perundang-undangan (Florida, 2007).

Kinerja keuangan pemerintah daerah dikelola melalui manajemen keuangan daerah. Manajemen keuangan daerah adalah pengorganisasian dan pengelolaan sumber-sumber daya atau kekayaan yang ada pada suatu daerah untuk mencapai tujuan yang dikehendaki daerah tersebut. Pendelegasian kewenangan tentunya disertai dengan penyerahan dan pengalihan tanggungjawab pendanaan, sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia dalam kerangka desentralisasi fiskal. Pendanaan kewenangan yang diserahkan dapat dilakukan dengan dua cara yaitu mendayagunakan potensi keuangan daerah sendiri dan mekanisme perimbangan keuangan pusat-daerah dan antar daerah.

Kewenangan untuk memanfaatkan sumber keuangan sendiri dilakukan dalam wadah Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sumber utamanya adalah pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. Sedangkan pelaksanaan perimbangan keuangan dilakukan melalui Dana Perimbangan yaitu dana bagi hasil yang terdiri dari pajak dan sumber daya alam, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus (Undang-undang Nomor 33/2004). Kebijakan penggunaan semua dana tersebut diserahkan kepada pemerintah daerah (Frelistiyani, 2010). Dalam rangka menjalankan fungsi dan

kewenangannya pemerintah daerah diharapkan mampu mencari sumber-sumber penerimaan keuangannya sendiri khususnya untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan dan pembangunan dengan bertumbuh kepada pendapatan asli daerah (PAD) yang dimilikinya.

DAU memegang peranan yang sangat dominan dibandingkan sumber dan lain seperti dana alokasi khusus maupun dana kontijensi (penyeimbangan). Dana Alokasi Khusus (DAK) diarahkan secara khusus untuk kepentingan yang khusus. Untuk itu diharapkan DAU dapat digunakan secara efektif dan efisien untuk meningkatkan pelayanan pada masyarakat sebagai tujuan dari desentralisasi yaitu untuk mempercepat pembangunan disamping tetap memaksimalkan potensi daerah untuk membiayai kebutuhan daerah.

Rasio belanja modal terhadap total belanja daerah mencerminkan porsi belanja daerah yang dibelanjakan untuk belanja modal. Belanja Modal ditambah belanja barang dan jasa, merupakan belanja pemerintah yang diharapkan memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan daerah suatu daerah, selain dari sektor swasta, rumah tangga, dan luar negeri. Oleh karena itu, semakin tinggi angka rasionya, semakin baik pengaruhnya terhadap kinerja keuangan daerah. Sebaliknya, semakin rendah angkanya, semakin buruk pengaruhnya

terhadap kinerja keuangan daerah. Kecenderungan belanja daerah se- Kabupaten/Kota di Sumatera Barat untuk periode tahun 2010-2014.

Dalam prakteknya penyusunan laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Sumatera Barat banyak mengalami kendala antara lain keterbatasan sumber daya manusia baik kualitas maupun kuantitas, sistem akuntansi yang belum didasarkan pada Peraturan Daerah tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah dan kebijakan akuntansi yang belum dilandasi oleh peraturan kepala daerah untuk dapat melaksanakan pengelolaan keuangan daerah dan juga terbatasnya pemahaman aparat terhadap laporan keuangan, ditambah lagi dengan fakta yang diperoleh dari hasil pemeriksaan BPK pada tahun 2013, yang menyatakan bahwa sebesar 15% LKPD (Laporan Keuangan pemerintah daerah berada pada level opini TMP (Tidak Memberi Pernyataan) dan TW (Tidak Wajar). Pernyataan tersebut bisa menggambarkan masih buruknya transparansi dan akuntabilitas pemerintah daerah sehingga hal tersebut menimbulkan konsekuensi logis yang harus diterima oleh pemerintah daerah, yaitu buruknya penilaian kinerja keuangan pemerintah daerah tersebut.

Penelitian ini mengacu pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Julitawati (2012) yang melakukan penelitian di

kabupaten / kota di provinsi Aceh yang mengatakan bahwa secara simultan PAD dan Dana Perimbangan berpengaruh terhadap kinerja keuangan daerah. Secara parsial PAD dan dana perimbangan berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Terbukti PAD berpengaruh terhadap kinerja keuangan, artinya setiap kenaikan PAD akan diikuti oleh peningkatan kinerja keuangan pemerintah. Dana Perimbangan berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah kabupaten/kota. Artinya, semakin besar Dana Perimbangan maka secara relatif akan mempengaruhi penurunan kinerja keuangan pemerintah daerah.

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, serta perbedaan hasil yang diperoleh beberapa penelitian sebelumnya, penulis termotivasi untuk melakukan penelitian dengan judul "Pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus dan belanja modal terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah Kab/Kota Se Sumatera Barat".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, peneliti merumuskan beberapa masalah sebagai berikut:

1. Seauhmana pengaruh pendapatan asli daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah Kab/Kota Se Sumatera Barat?
2. Seauhmana pengaruh dana alokasi umum terhadap kinerja

keuangan pemerintah daerah Kab/Kota Se Sumatera Barat?

3. Sejauhmana pengaruh dana alokasi khusus terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah Kab/Kota Se Sumatera Barat?
4. Sejauhmana pengaruh belanja modal terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah Kab/Kota Se Sumatera Barat?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah di atas maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui :

1. Pengaruh pendapatan asli daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah Kab/Kota Se Sumatera Barat.
2. Pengaruh dana alokasi umum terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah Kab/Kota Se Sumatera Barat.
3. Pengaruh dana alokasi khusus terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah Kab/Kota Se Sumatera Barat.
4. Pengaruh belanja modal terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah Kab/Kota Se Sumatera Barat.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi:

1. Pemerintah Daerah, penelitian ini dapat menjadi masukan dalam peningkatan pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus dan belanja modal terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.
2. Masyarakat, sebagai bentuk informasi pendapatan asli daerah, dana alokasi umum,

dana alokasi khusus dan belanja modal serta hubungannya dalam mempengaruhinya kinerja keuangan pemerintah daerah.

3. Akademis, penelitian ini bermanfaat untuk menambah pengetahuan penulis sekaligus memenuhi salah satu syarat mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi pada Program Studi Manajemen Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.

BAB II

KAJIAN TOERI, KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS

A. Kajian Teori

1. Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

- a. Pengertian Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Kinerja adalah pencapaian atas apa yang direncanakan, baik oleh pribadi maupun organisasi (Sularso dan Restianto, 2011). Secara sederhana, kinerja seseorang atau organisasi dikatakan baik apabila hasil yang dicapai sesuai dengan target yang direncanakan. Apabila pencapaian melebihi target, maka kinerja dikatakan sangat baik, sedangkan apabila lebih rendah dari target maka dapat dikatakan bahwa kinerjanya buruk.

Kinerja keuangan adalah suatu ukuran kinerja yang menggunakan indikator keuangan (Sularso dan Restianto, 2011). Analisis kinerja keuangan pada dasarnya dilakukan untuk

menilai kinerja di masa lalu dengan melakukan berbagai analisis sehingga diperoleh posisi keuangan yang mewakili realitas entitas dan potensi-potensi kinerja yang akan berlanjut. Karena menggunakan indikator keuangan, maka alat analisis yang tepat untuk mengukur kinerja keuangan adalah analisis keuangan.

Penggunaan analisis rasio sebagai alat analisis keuangan secara luas telah diterapkan pada lembaga perusahaan yang bersifat komersial, namun pada lembaga publik, khususnya pemerintah daerah, masih sangat terbatas. Hal tersebut dikarenakan adanya keterbatasan penyajian laporan keuangan pada pemerintah daerah yang sifat dan cakupannya berbeda dengan penyajian laporan keuangan oleh perusahaan yang bersifat komersial. Di samping itu, penilaian keberhasilan APBD sebagai penilaian pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah lebih ditekankan pada pencapaian target, sehingga kurang memperhatikan bagaimana perubahan yang terjadi pada komposisi ataupun struktur APBD (Halim, 2007).

- 1) Rasio Efektivitas PAD
Rasio efektivitas PAD menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan PAD yang

dicanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Formulasinya adalah sebagai berikut (Halim, 2002):

$$\text{Rasio Efektifitas PAD} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah}}$$

- 2) Rasio Efisiensi
Rasio efisiensi merupakan rasio yang menggambarkan perbandingan antara output dan input atau realisasi pengeluaran dengan realisasi penerimaan daerah.

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi pengeluaran}}{\text{Realisasi penerimaan}}$$

- b. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kinerja Keuangan

- 1) Pendapatan Asli Daerah
Pendapatan Asli Daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. PAD bertujuan memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan Desentralisasi (UU NO. 33/2004).

Pasal 157 Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menyebutkan bahwa kelompok PAD dipisahkan menjadi empat jenis pendapatan, yaitu:

- a) Hasil pajak daerah.
 - b) Hasil retribusi daerah
 - c) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
 - d) Lain-lain PAD yang sah
- 2) Dana Perimbangan

Dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi (UU No. 33/2004). Menurut (Halim, 2002) dalam bukunya yang berjudul “Akuntansi Keuangan Daerah” dijelaskan bahwa Dana Perimbangan merupakan dana yang bersumber dari penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhan daerah.

Pemerintah pusat dalam undang-undang No. 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, mengalokasikan sejumlah dana dari APBN sebagai dana perimbangan yaitu:

a) Dana Bagi Hasil (DBH). Dana Bagi Hasil bersumber dari :

(1) Pajak, seperti :
Pajak Bumi dan Bangunan (PBB),
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), dan
Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29
Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21.

(2) Sumber Daya Alam, seperti :
Kehutanan,
pertambangan umum, perikanan,
pertambangan minyak bumi,
pertambangan gas bumi, dan
pertambangan panas bumi.

- b) Dana Alokasi Umum (DAU),
- c) Dana Alokasi Khusus (DAK)

3) Belanja Modal

Belanja Modal adalah belanja yang dilakukan pemerintah yang menghasilkan aktiva tetap tertentu (Nordian, 2006 dalam Christy dan Adi, 2008) .Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.91/PMK.06/2007

tentang Bagan Akun Standar (BAS) menyebutkan bahwa belanja modal merupakan

pengeluaran anggaran yang digunakan dalam rangka memperoleh atau menambah aset tetap dan aset lainnya yang memberimanfaat lebih dari satu periode akuntansi serta melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap atau aset lainnya yang ditetapkan pemerintah. Aset tetap tersebut dipergunakan untuk operasional kegiatan sehari-hari suatu satuan kerja, bukan untuk dijual (Putro, 2010).

2. Pendapatan Asli Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003, pendapatan daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. (Yuwono, 2005:107) menyatakan bahwa pendapatan daerah adalah semua penerimaan kas yang menjadi hak daerah dan diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.

Menurut Mardiasmo (2002), “pendapatan asli daerah adalah penerimaan yang diperoleh dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah”.

Di dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah disebutkan bahwa sumber pendapatan daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Bagi Hasil

Pajak dan Bukan Pajak. Pendapatan Asli Daerah sendiri terdiri dari: 1) Pajak daerah, 2) Retribusi daerah, 3) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, 4) Lain-lain PAD yang sah.

Klasifikasi PAD yang terbaru berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 terdiri dari Pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Jenis pajak daerah dan retribusi daerah dirinci menurut objek pendapatan sesuai dengan undang-undang tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Jenis hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dirinci menurut objek pendapatan yang mencakup bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/ BUMD, bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usahamasyarakat.

3. Dana Alokasi Umum

Berdasarkan Undang-Undang No.33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah memberikan pengertian bahwa: DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan antar daerah, untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Sehingga, DAU merupakan dana yang didapat oleh pemerintah daerah dari APBN, guna mendanai kebutuhan daerah dalam melaksanakan desentralisasi.

Kuncoro (2004: 30) menyatakan bahwa tujuan penting dari DAU adalah dalam kerangka pemerataan kemampuan keuangan penyediaan pelayanan publik antar pemerintah daerah di Indonesia. DAU dialokasikan dengan tujuan pemerataan dengan memperhatikan potensi daerah, luas daerah, demografi, jumlah penduduk dan tingkat pendapatan masyarakat di tiap-tiap daerah, sehingga perbedaan antara daerah yang maju dengan daerah yang belum berkembang dapat diperkecil.

4. Dana Alokasi Khusus

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Pasal 1, Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.

Menurut Yani (2002) dana alokasi khusus dimaksudkan untuk mendanai kegiatan khusus yang menjadi urusan daerah dan merupakan prioritas nasional, sesuai dengan fungsi yang merupakan perwujudan tugas pemerintahan di bidang tertentu, khususnya dalam upaya pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan dasar masyarakat.

DAK dialokasikan dalam APBN sesuai dengan program yang menjadi prioritas nasional. DAK dialokasikan kepada daerah tertentu untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan bagian dari program yang menjadi prioritas

nasional yang menjadi urusan daerah serta untuk membantu daerah dalam mendanai kebutuhan fisik sarana dan prasarana dasar yang merupakan prioritas nasional di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, kelautan dan perikanan, pertanian, prasarana pemerintahan daerah serta lingkungan hidup.

5. Belanja Modal

Menurut Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), pengertian belanja modal adalah pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal yang sifatnya menambah aset tetap/inventaris yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi, termasuk di dalamnya adalah pengeluaran untuk biaya pemeliharaan yang sifatnya mempertahankan atau menambah masa manfaat, serta meningkatkan kapasitas dan kualitas aset. Dalam SAP, belanja modal dapat diategorikan ke dalam 5 (lima) kategori utama, yaitu: (1) belanja modal tanah; (2) belanja modal peralatan dan mesin; (3) belanja modal gedung dan bangunan; (4) belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan; dan (5) belanja modal fisik lainnya.

Mardiasmo (2009: 67) menyatakan bahwa belanja modal yaitu pengeluaran yang manfaatnya melebihi satu tahun anggaran dan dapat menambah aset pemerintah yang selanjutnya meningkatkan biaya pemeliharaan. Menurut PP Nomor 71 Tahun 2010, "Belanja modal merupakan belanja Pemerintah Daerah yang manfaatnya melebihi 1 tahun anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan daerah dan selanjutnya akan menambah belanja yang bersifat

rutin seperti biaya pemeliharaan pada kelompok belanja administrasi umum”. Sehingga belanja modal dapat diartikan sebagai pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga menambah kekayaan atau aset yang masa manfaatnya melebihi satu tahun, kemudian mengakibatkan bertambahnya biaya yang bersifat rutin untuk biaya pemeliharaan.

B. Penelitian Terdahulu

Abdullah (2015) menyimpulkan bahwa 1) Pendapatan asli daerah (PAD) berpengaruh terhadap kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten dan Kota se-Sumatera Bagian Selatan periode 2011-2013. Hal ini menunjukkan bahwa pola manajemen pemerintah daerah kabupaten/kota se-Sumatera Bagian Selatan mempertimbangkan pendapatan asli daerah (PAD) sebagai salah faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan. 2) Dana alokasi umum (DAU) tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten dan Kota se-Sumatera Bagian Selatan periode 2011-2013. Hal ini menunjukkan bahwa pola manajerial pemerintah daerah kabupaten/kota se-Sumatera Bagian Selatan tidak mempertimbangkan dana alokasi umum (DAU) sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan. 3) Dana alokasi khusus (DAK) tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten dan Kota se-Sumatera Bagian Selatan periode 2011-2013. Hal ini menunjukkan bahwa pola manajemen pemerintah daerah kabupaten/kota se-Sumatera Bagian Selatan tidak mempertimbangkan dana alokasi khusus (DAK) sebagai

salah satu faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan.

Wenny (2012) menyimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pada pemerintah kabupaten dan kota di Provinsi Sumatera Selatan, artinya keseluruhan dari komponen PAD sangat mempengaruhi kinerja keuangan pada pemerintah kabupaten dan kota di Provinsi Sumatera Selatan sesuai dengan prinsip-prinsip otonomi daerah. Penelitian juga dilakukan untuk melihat bagaimana pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara parsial terhadap kinerja keuangan pada pemerintah kabupaten dan kota di Provinsi Sumatera Selatan. Hasilnya menyatakan bahwa secara parsial hanya lain-lain PAD yang sah yang secara dominan berpengaruh terhadap kinerja keuangan pada pemerintah kabupaten dan kota di Provinsi Sumatera Selatan, sedangkan pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil perusahaan dan kekayaan daerah tidak dominan mempengaruhi kinerja keuangan pada pemerintah kabupaten dan kota di Provinsi Sumatera Selatan.

Penelitian Florida (2007) tentang pengaruh pendapatan asli daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara menyimpulkan bahwa komponen PAD seperti pajak daerah dan retribusi daerah berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

C. Hubungan Antar Variabel

1. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Kinerja Keuangan

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber pendapatan penting

bagi sebuah daerah dalam memenuhi belanjanya. Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap alokasi belanja langsung. PAD memiliki peran yang cukup signifikan dalam menentukan kemampuan daerah untuk melakukan aktivitas pemerintah dan program-program pembangunan daerah. Pemerintah mempunyai kewajiban untuk meningkatkan taraf kesejahteraan rakyat serta menjaga dan memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat.

Otonomi daerah dan desentralisasi fiskal mengharapkan pemerintah daerah memiliki kemandirian yang lebih besar dalam keuangan daerah. Oleh karena itu, peranan Pendapatan Asli Daerah sangat menentukan kinerja keuangan daerah. Dengan potensi yang dimiliki oleh masing-masing daerah diharapkan dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan penerimaan daerah. Penerimaan daerah tersebut dapat digunakan untuk membiayai segala kewajibannya dalam menjalankan pemerintahannya, termasuk untuk digunakan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa Pendapatan Asli Daerah merupakan semua penerimaan yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah yaitu pajak daerah, retribusi daerah, laba BUMD, penerimaan lain-lain yang sah dan bukan dari pajak atau retribusi. Semakin besar kontribusi pendapatan asli daerah untuk membiayai pembangunan dan pelayanan masyarakat maka dapat dikatakan ada peningkatan kinerja keuangan pemerintah daerah. Jika pendapatan asli daerah naik maka

dapat dikatakan kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten dan Kota naik (meningkat).

2. Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Kinerja Keuangan

DAU merupakan salah satu transfer dana pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang bersumber dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antardaerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Menurut Undang-Undang Nomor 33/2004, Dana Alokasi umum adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah otonom dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana Alokasi Umum merupakan salah satu dana yang berasal dari dana perimbangan dan dana perimbangan merupakan salah satu komponen pendapatan pada APBD. Di beberapa daerah peran DAU sangat signifikan karena karena kebijakan belanja daerah lebih didominasi oleh jumlah DAU dari pada PAD (Sidik, 2002).

Terdapat keterikatan yang sangat erat antara transfer dari Pemerintah Pusat dengan kinerja Keuangan Pemerintah Daerah yaitu kecenderungan dimana daerah lebih mengandalkan penerimaan DAU daripada PAD untuk kepentingan pembiayaan daerah menunjukkan bahwa tingkat kinerja Keuangan Pemerintah tersebut dipengaruhi oleh DAU.

3. Pengaruh Dana Alokasi Khusus terhadap Kinerja Keuangan

Dana Alokasi Khusus (DAK) juga merupakan dana yang berasal dari dana perimbangan selain dana alokasi umum dan dana bagi hasil. Tujuan DAK untuk mengurangi beban biaya kegiatan khusus yang harus ditanggung oleh pemerintah daerah. Pemanfaatan DAK diarahkan kepada kegiatan investasi pembangunan, pengadaan, peningkatan, perbaikan sarana dan prasarana fisik pelayanan publik dengan umur ekonomis panjang.

DAK digunakan untuk menutup kesenjangan pelayanan publik antar daerah dengan memberi prioritas pada bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, kelautan dan perikanan, pertanian, prasarana pemerintahan daerah, dan lingkungan hidup. Apabila dikelola dengan baik, DAK yang secara khusus digunakan untuk pembangunan dan rehabilitasi sarana dan prasarana fisik ini dapat membantu menanggulangi kemiskinan dan secara umum dapat digunakan untuk membangun perekonomian nasional.

DAK diberikan dengan tujuan untuk membiayai kegiatan-kegiatan khusus pada daerah tertentu yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional, khususnya untuk membiayai kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan dasar masyarakat yang belum mencapai standar tertentu atau untuk mendorong percepatan pembangunan daerah, maka semakin tinggi DAK maka akan semakin tinggi Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Bertambahnya kucuran DAK ke daerah setiap tahun semestinya disertai rancangan lebih terarah dan pemanfaatannya benar-benar untuk kepentingan rakyat dan

bukan rancangan yang memberi peluang terjadinya kebocoran anggaran. Jika kebocoran itu terjadi menunjukkan tingkat Kinerja Keuangan Pemerintah daerah rendah.

4. Pengaruh Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan

Pembangunan sarana dan prasarana oleh pemerintah daerah berpengaruh positif pada kinerja keuangan (Kuncoro, 2004). Peningkatan pelayanan sektor publik secara berkelanjutan akan meningkatkan sarana dan prasarana publik, investasi pemerintah juga meliputi perbaikan fasilitas pendidikan, kesehatan, dan sarana penunjang lainnya. Syarat fundamental untuk pembangunan ekonomi adalah tingkat pengadaan modal pembangunan yang seimbang dengan peningkatan PDN/PDRB. Pembentukan modal tersebut harus didefinisikan secara luas sehingga mencakup semua pengeluaran yang sifatnya menaikan produktivitas (Ismerdekaningsih & Rahayu, 2002). Penelitian Adi (2006) membuktikan bahwa belanja modal mempunyai pengaruh positif terhadap kinerja ekonomi alokasi belanja modal untuk pengembangan infrastruktur penunjang ekonomi, akan mendorong tingkat produktivitas penduduk. Pada gilirannya hal ini dapat meningkatkan pendapatan masyarakat secara umum yang tercermin dalam pendapatan per kapita.

D. Kerangka Konseptual

Penelitian ini akan melihat pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus dan belanja modal terhadap kinerja

keuangan pemerintah daerah kab/kota Se Sumatera Barat.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber pendapatan penting bagi sebuah daerah dalam memenuhi belanjanya. Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap alokasi belanja langsung. PAD memiliki peran yang cukup signifikan dalam menentukan kemampuan daerah untuk melakukan aktivitas pemerintah dan program-program pembangunan daerah. Peningkatan pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan asli daerah lainnya dapat menyebabkan pendapatan asli daerah (PAD) meningkat dan akan mendorong kinerja keuangan daerah. Adanya kenaikan PAD akan memicu dan memacu kinerja keuangan daerah menjadi lebih baik dari pada kinerja keuangan daerah sebelumnya. Hal ini disebabkan karena pendapatan asli daerah adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Sumber pendapatan daerah berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Semakin besar nilai PAD maka semakin besar pula dana yang dihasilkan dari pendapatan asli daerah tersebut, sehingga memicu dan memacu kinerja keuangan untuk meningkat.

Dana Alokasi Umum adalah sejumlah dana yang dialokasikan kepada setiap daerah otonom di setiap tahunnya sebagai dana pembangunan. DAU merupakan salah satu komponen belanja pada APBN dan menjadi salah

satu komponen pendapatan pada APBD yang bertujuan sebagai pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah otonom, yang semakin tinggi nilai DAU maka kinerja keuangan daerah juga semakin meningkat, yang menyebabkan kebutuhan masyarakat semakin terpenuhi. Jika ternyata PAD berpengaruh pada kinerja keuangan, maka terdapat kemungkinan kuat bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) juga berpengaruh terhadap kinerja keuangan daerah.

Dana Alokasi Umum adalah alokasi dari APBN kepada kabupaten/kota tertentu dengan tujuan untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan pemerintah daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Jika ternyata PAD dan DAU berpengaruh terhadap kinerja keuangan daerah, maka terdapat kemungkinan kuat bahwa Dana Alokasi Khusus juga berpengaruh terhadap kinerja keuangan daerah.

Belanja modal adalah komponen belanja langsung dalam anggaran pemerintah yang menghasilkan output berupa aset tetap. Dalam pemanfaatan aset tetap yang dihasilkan tersebut, ada yang bersinggungan langsung dengan pelayanan publik atau dipakai oleh masyarakat (seperti jalan, jembatan, trotoar, gedung olah raga, stadion, jogging track, halte, dan rambu lalu lintas) dan ada yang tidak langsung dimanfaatkan oleh publik (seperti gedung kantor pemerintahan). Dalam perspektif kebijakan publik, sebagian besar belanja modal berhubungan dengan pelayanan publik, sehingga pada setiap anggaran tahunan jumlahnya semestinya relatif besar.

Secara sederhana kerangka konseptual penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 1. Kerangka Konseptual

E. Pengembangan Hipotesis

Berdasarkan teori dan latar belakang permasalahan yang telah dikemukakan sebelumnya, maka dapat dibuat beberapa hipotesis terhadap permasalahan sebagai berikut:

H1 Pendapatan asli daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah Kab/Kota Se Sumatera Barat.

H2: Dana alokasi umum berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah Kab/Kota Se Sumatera Barat.

H3: Dana alokasi khusus berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah Kab/Kota Se Sumatera Barat

H4: Belanja modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah Kab/Kota Se Sumatera Barat

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Berdasarkan pada judul dan permasalahan, maka jenis penelitian ini adalah penelitian kausatif. Penelitian kausatif adalah penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan atau keterkaitan antara variabel bebas dan variabel terikat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh pendapatan asli daerah, dana

alokasi umum, dana alokasi khusus dan belanja modal terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah Kab/Kota Se Sumatera Barat.

B. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh kabupaten dan kota di Sumatera Barat.

2. Sampel

Penentuan sampel ditetapkan dengan teknik total sampling, yaitu seluruh populasi dijadikan sampel. Jumlah daerah kabupaten dan kota di Sumatera Barat adalah 19, berarti sampel yang digunakan juga sebanyak 19 kabupaten dan kota di Sumatera Barat. Jumlah populasi dalam penelitian ini dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 5

Daftar Nama Kabupaten/Kota di Sumatera Barat

Sumber Badan Pusat Statistik, 2016

C. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data digunakan dalam penelitian ini

a. Berdasarkan

memperolehnya, jenis ini adalah data sekunder yaitu data Laporan Realisasi APBD yang diperoleh dari instansi-instansi terkait dan hasil studi perpustakaan pada Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sumatera Barat.

b. Berdasarkan waktu, data penelitian ini adalah pooling gabungan antara data silang (*cross section*) dan data runtut waktu (*time series*). Data time series yang

digunakan yaitu data time series tahunan dari tahun 2010-2014. Sedangkan data *cross section* yang digunakan adalah 19 kabupaten/kota di Sumatera Barat. Dengan demikian, data pooling tersebut menghasilkan 95 observasi.

- c. Berdasarkan sifat, data yang digunakan adalah data kuantitatif karena data diperoleh dalam bentuk angka-angka.

D. Teknik Pengumpulan Data

Untuk menganalisis permasalahan dan mencari pemecahan permasalahan yang diinginkan, maka dibutuhkan data yang akurat, karena jika data yang digunakan tidak memenuhi syarat, maka analisis yang akan dilakukan akan menjadi salah dan akan berakibat pengambilan data akan menjadi tidak cepat. Cara yang digunakan dalam pengambilan data adalah dengan teknik dokumentasi, yaitu pengumpulan data yang diperoleh dari instansi-instansi yang terkait dan BPS Sumatera Barat.

E. Metode Analisis Data

1. Analisis Deskriptif

Analisis deskriptif bertujuan untuk menggambarkan apa yang ditemukan pada hasil penelitian dan memberikan informasi sesuai dengan yang diperoleh dilapangan.

2. Analisis Induktif

a. Uji Asumsi Klasik

1) Uji Normalitas

Uji ini bertujuan untuk menguji apakah model regresi variabel terikat dan

variabel bebas mempunyai distribusi normal atau tidak. Dalam penelitian ini pengujian normalitas data menggunakan *kolmogorof-smirnov test* dengan taraf signifikan 5%.

Dasar pengambilan keputusan yaitu jika signifikansi $>5\%$, maka dikatakan berdistribusi normal, jika signifikansi $<5\%$, maka dikatakan tidak berdistribusi normal.

2) Uji Multikolinearitas

Menurut Ghazali (2012) uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (*independen*). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen. Jika variabel independen berkorelasi, maka variabel-variabel ini tidak orthogonal. Variabel orthogonal adalah variabel independen yang nilai korelasi antar sesama variabel independen sama dengan nol.

Dalam penelitian ini untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolinearitas di dalam model regresi adalah dengan melihat tolerance value dan Variance Inflation Factor. (VIF), dengan kriteria tolerance $>0,10$ atau sama dengan nilai VIF < 10 maka model tidak mengandung masalah multikolinearitas.

3) Uji Heterokedastisitas

.Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual suatu pengamatan ke pengamatan yang lain. Model regresi yang baik adalah yang homokedastisitas atau tidak heteroskedastisitas. Uji heteroskedastisitas dalam penelitian ini diuji dengan Scaterplots.

4) Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya). Jika terjadi korelasi, maka dinamakan ada masalah autokorelasi. Model regresi yang baik adalah regresi yang bebas dari masalah autokorelasi. Dalam penelitian ini untuk mendeteksi ada atau tidaknya masalah autokorelasi digunakan uji Durbin – Watson (Ghozali, 2012).

Pengambilan keputusan ada tidaknya autokorelasi dapat pada tabel 2 berikut:

Tabel 6
Klasifikasi Nilai d (D-W)

b. Model dan Teknik Analisis Data

1) Analisis Regresi Berganda

Analisis regresi berganda digunakan untuk mengukur pengaruh antara lebih dari satu variabel bebas terhadap variabel terikat, dalam penelitian ini yaitu pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus dan belanja modal terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah Kab/Kota Se Sumatera Barat dengan menggunakan software SPSS ver.17.

Dari model di atas dapat dijelaskan bahwa kinerja keuangan pemerintah daerah (Y_{it}) dipengaruhi secara positif oleh pendapatan asli daerah ($X1_{it}$), dana alokasi umum ($X2_{it}$), dana alokasi khusus ($X2_{it}$) dan belanja modal ($X3_{it}$), artinya semakin tinggi pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus dan belanja modal maka semakin baik kinerja keuangan pemerintah daerah (Y_{it}).

2) Koefisien Determinasi (R^2)

Pengujian ini digunakan untuk melihat atau mengetahui kontribusi variabel bebas dalam menjelaskan variabel terikat. Nilai R^2 berkisar antara nol dan satu ($0 < R^2 < 1$). Nilai R^2 yang kecil atau mendekati nol berarti kemampuan variabel bebas dalam menjelaskan variasi variabel terikat sangat terbatas. Sebaliknya, jika R^2 mendekati satu berarti

variabel bebas memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel terikat dan model tersebut dapat dikatakan baik.

3) Uji F (F-Test)

Uji F dilakukan bertujuan untuk menguji apakah hasil analisis regresi berganda modelnya sudah fix atau belum dan untuk dapat mengetahui pengaruh antara variabel bebas variabel terikat secara keseluruhan atau secara simultan. Kriteria yang digunakan dalam pengujian ini adalah membandingkan nilai sig yang diperoleh dengan derajat signifikansi pada level $\alpha = 0,05$. Apabila nilai sig yang diperoleh lebih kecil dari derajat signifikansi maka model yang digunakan sudah fix variabel bebas berpengaruh secara keseluruhan terhadap variabel terikat.

4) Uji Hipotesis (t-Test)

Uji parsial merupakan suatu pengujian yang bertujuan untuk mengetahui apakah variabel bebas secara parsial berpengaruh terhadap variabel terikat. Dengan asumsi bahwa jika nilai t hitung yang dilihat dari analisis regresi menunjukkan kecil dari $\alpha = 0,05$ berarti variabel bebas berpengaruh terhadap variabel terikat. Dengan tingkat kepercayaan untuk pengujian hipotesis 95% atau $\alpha = 0,05$ (5%)

Kriteria pengujian hipotesis:

- 1) H_0 ditolak = jika $t_o \geq t$ tabel atau... $-t_o < \dots -t$ tabel
- 2) H_0 diterima = jika $t_o \geq t$ tabel atau ... $-t_o \geq \dots -t$ tabel

Jika $t_o \geq t$ tabel atau $-t_o < -t$ tabel, maka H_a diterima dan H_0 ditolak, artinya terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel bebas terhadap variabel terikat. Tetapi jika $t_o < t$ tabel atau $-t_o \geq -t$ tabel maka, H_a ditolak dan H_0 diterima artinya tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel bebas terhadap variabel terikat.

Cara kedua yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah membandingkan nilai probabilitas yang dihitung dengan nilai α , jika probabilitas lebih kecil daripada nilai signifikansi (0,05), maka H_0 ditolak dan H_a diterima berarti terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel bebas terhadap variabel terikat begitu juga sebaliknya.

F. Definisi Operasional

Untuk lebih memudahkan dalam penulisan dan untuk menghindari penafsiran yang berbeda pada penelitian ini, maka penulis perlu menjelaskan definisi operasional variabel sebagai berikut:

1. Kinerja Keuangan Pemerintah (Y)

Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah adalah

kemampuan suatu daerah untuk menggali dan mengelola sumber-sumber keuangan asli daerah dalam memenuhi kebutuhannya guna mendukung berjalannya sistem pemerintahan, pelayanan kepada masyarakat dan pembangunan daerahnya dengan tidak tergantung sepenuhnya kepada pemerintah pusat dan mempunyai keleluasaan didalam menggunakan dana-dana untuk kepentingan masyarakat daerah dalam batas-batas yang ditentukan peraturan perundang-undangan.

2. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan daerah yang diperoleh dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan desentralisasi. Pendapatan Asli Daerah dapat diketahui dari nilai Rupiah (Rp) yang terdapat pada pos Pendapatan Asli Daerah dalam Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat pada Tahun Anggaran 2010 - 2014.

3. Dana Alokasi Umum

Dana Alokasi Umum (DAU) adalah transfer dana dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah yang dimaksudkan untuk menutupi kesenjangan fiskal (*fiscal gap*) dan pemerataan kemampuan fiskal antar daerah dalam rangka membantu kemandirian pemerintah daerah dalam menjalankan fungsi tugasnya untuk melayani masyarakat (Stasistik Keuangan BPS, 2011). Tujuan DAU adalah sebagai pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah Otonom dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana Alokasi Umum dapat diketahui dari nilai Rupiah (Rp) yang terdapat pada pos Dana Alokasi Umum dalam Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat pada tahun anggaran 2010 – 2014

4. Dana Alokasi Khusus

Dana Alokasi Khusus merupakan dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Pengukuran variabel DAK ini diukur dengan menggunakan skala rasio. Indikator DAK terdiri dari kriteria umum, kriteria khusus dan kriteria teknis.

5. Belanja Modal

Belanja Modal adalah alokasi pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi, dibandingkan dengan total belanja dalam APBD.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk melihat sejauh mana Pengaruh Pendapatan Asli daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Belanja Modal pada Kinerja Keuangan Daerah pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Barat tahun 2010-2014. Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, beberapa kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah :

1. Pendapatan Asli Daerah berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan daerah. Adanya faktor faktor lain pembentuk pendapatan daerah menunjukkan bahwa pendapat asli daerah merupakan salah satu pembentuk pendapatan daerah. Dari hasil penelitian ini ditemukan bahwa semakin tinggi pendapatan asli daerah akan mempengaruhi tinggi dan rendahnya kinerja keuangan daerah
2. Dana alokasi umum tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan daerah. Dari hasil penelitian ini ditemukan bahwa semakin tinggi atau rendahnya Dana alokasi umum tidak mempengaruhi tinggi dan rendahnya kinerja keuangan daerah.
3. Dana alokasi khusus berpengaruh signifikan negatif terhadap kinerja

keuangan daerah. Dari hasil penelitian ini ditemukan bahwa semakin tinggi dana alokasi maka akan menimbulkan rendahnya kinerja keuangan daerah dan sebaliknya.

4. Belanja modal berpengaruh tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan daerah. Belanja modal yang tinggi ataupun rendah tidak dapat mempengaruhi upaya pemerintah dalam mengoptimalkan kinerja keuangan pemerintah daerah.

B. Keterbatasan Penelitian

Beberapa keterbatasan dalam penelitian ini :

1. Penelitian ini hanya menguji sebagian dari komponen PAD yaitu dana alokasi umum, dana alokasi khusus dan belanja modal.
2. Penelitian ini mengabaikan faktor-faktor politik yang mungkin juga mempengaruhi penelitian ini.
3. Penelitian atau data observasi yang digunakan hanya pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Barat, sehingga belum dapat mewakili seluruh kabupaten dan kota di Indonesia.

C. Saran

Saran yang dapat diberikan penulis yaitu:

1. Bagi pemerintah kabupaten dan kota di Provinsi Sumatera Barat, sebaiknya berkonsentrasi untuk terus dapat lebih meningkatkan dan mengembangkan kinerja keuangan daerah melalui potensi dan kemampuan daerah dalam menghasilkan pendapatan asli daerah serta semakin mumpuni dalam mengelola dana alokasi umum dan khusus yang diberikan kepada daerah untuk menciptakan

- kinerja keuangan pemerintah daerah yang semakin baik. Selain
2. Bagi peneliti selanjutnya sebaiknya juga menambah periode pengamatan, menambah beberapa variabel dari PAD lainnya agar lebih mengetahui faktor lainnya yang mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah. Penulis menyadari masih banyak keterbatasan dalam penelitian ini, oleh sebab itu diperlukan penelitian lain dengan ruang lingkup yang lebih luas dan kurun waktu yang lebih besar. Agar penelitian ini lebih jelas dan lebih lengkap, sebaiknya penerimaan daerah selain pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus dan belanja modal dijabarkan sehingga dapat dilihat bagaimana pengaruhnya terhadap kinerja keuangan kabupaten dan kota di Provinsi Sumatera Barat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah. 2015. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Lokasi Khusus terhadap Kinerja Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota se-Sumatera Bagian Selatan. *Simposium Nasional Akuntansi 18, Universitas Sumatera barat, Medan 16-19 September 2015*.
- Bastian, I., 2006. *Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar*. Jakarta: Erlangga
- Batubara, Dian Nofrina. 2009. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Kinerja Keuangan pada Pemerintah Kabupaten dan Kota di Propinsi Sumatera Utara. *Skripsi Tidak Dipublikasi*. Medan; Universitas Sumatera Utara.
- DJPK. 2011. *Deskripsi dan Analisis APBD 2011*. Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Florida, Asha. 2007. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Utara. *Tesis Tidak Dipublikasi*. Medan; Universitas Sumatera Utara,
- Ghozali, Imam. 2012. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro
- Halim, Abdul. 2007. *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*. Salem ba Empat. Jakarta
- 2004. *Akuntansi Sektor Publik; Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Helfert, Erich A. 1982. *Techniques of Financial Analysis*. 5th Ed. Richard D. Irwin, Inc. Homewood, Illinois.
- Heller, Peter S. 2005. *Understanding Fiscal Space*. Policy Discussion Paper. International Monetary Fund.
- Julitawati, Darwanis dan Jalaluddin. 2012. "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten / Kota di Provinsi Aceh". *Jurnal Akuntansi Pascasarjana Universitas*

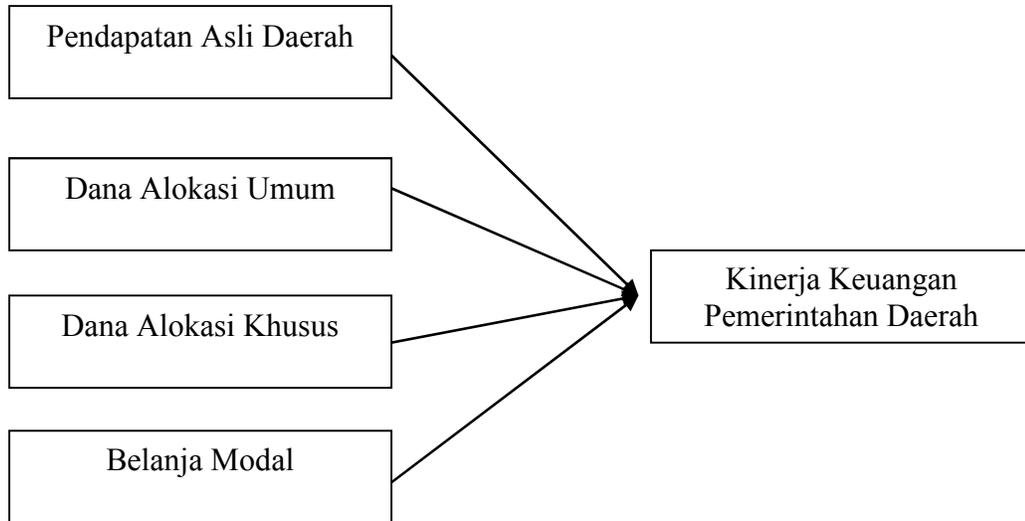
- Syiah Kuala. Vol. 1, No. 1.hal. 15-29
- Kuncoro, Mudrajad. 2004. *Metode Riset Untuk Bisnis Dan Ekonomi*. Jakarta: Erlangga
- . 2004. *Otonomi dan Pembangunan Daerah*. Jakarta : Erlangga
- Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta : ANDI
- Putro, Nugroho Suratno, 2010. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal (Studi Kasus Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah). *Skripsi Sarjana Universitas Diponegoro, Semarang*
- Rai, I.G. Agung. 2008. *Audit Kinerja Pada Sektor Publik: Konsep, Praktik, dan Studi Kasus*. Jakarta: Salemba Empat.
- Rukmana, Wan Vidi. 2013. "Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau". *Jurnal Universitas Maritim Raja Ali Haji*. hal. 1-15
- Saragih, Juli Panglima, 2003. *Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah Dalam Otonomi*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Sawir, Agnes. 2001. *Analisis Kinerja Keuangan dan Perencanaan Keuangan Perusahaan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Sidik, Machfud. 2002. *Dana Alokasi Umum Konsep, Hambatan, dan Prospek di Era Otonomi Daerah*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas
- Sidik, Machfud.2002. Format Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat Dan Daerah Yang Mengacu Pada Pencapaian Tujuan Nasional. Makalah disampaikan Acara Orasi Ilmiah. Jakarta. 17-18 April 2002
- Sularso, H., Restianto, Y.E. 2011. Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Alokasi Belanja Modal dan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Jawa Tengah. *Media Riset Akuntansi, Vol.1 No.2: 109-124*.
- Sumarjo, Hendro, 2010. Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Indonesia). *Skripsi*. Surakarta: Universitas Sebelas Maret. Kusumawardani, 2012
- Suprianto. 2013. "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pada Pemerintah Provinsi Gorontalo". *Jurnal Universitas Negeri Gorontalo*
- Susantih, H dan Saftiana, Y. 2009. "Perbandingan Indikator Kinerja Keuangan Pemerintah Provinsi se-Sumatera Bagian Selatan". *Jurnal Program Pascasarjana Akuntansi, Fakultas Ekonomi. Universitas Sriwijaya*.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang

Perimbangan Keuangan Antara
Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah

- Wenny, Cherrya. 2012. "Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Kinerja Keuangan Pada Pemerintahan Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Selatan". *Jurnal Ilmiah STIE MDP. Vol. 2, No. 1, hal. 39-51*
- World Bank, 2006. *Fiscal Policy for Growth and Development: An Interim Report*
- Yani, Ulpah. 2012. Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara. *Skripsi*. Universitas Sumatera Utara.
- Yuwono, S. dkk., 2005. *Penganggaran Sektor Publik*. Surabaya: Bayumedia Publishing.
- _____. Undang-undang Republik Indonesia No. 33 tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Lampiran :

Gambar 1. Kerangka Konseptual



Tabel Nama Nama Kota/Kabupaten di Sumatera barat

No	Nama-Nama Kabupaten/Kota
1	Kabupaten Pasaman
2	Kabupaten Pasaman Barat
3	Kabupaten Agam
4	Kabupaten Tanah Datar
5	Kabupaten Solok
6	Kabupaten Solok Selatan
7	Kabupaten 50 Kota
8	Kabupaten Dhamasraya
9	Kabupaten Sijunjung
10	Kabupaten Padang Pariaman
11	Kabupaten Pesisir Selatan
12	Kabupaten mentawai
13	Kota Padang
14	Kota Payakumbuh
15	Kota Solok
16	Kota Pariaman
17	Kota Bukittinggi
18	Kota Sawahlunto
19	Kota Padang Panjang

Tabel D-w

Nilai	Keterangan
<1,10	Ada Autokorelasi
1,10 – 1,54	Tidak Ada Autokorelasi
1,55 – 2,46	Tidak Ada Autokorelasi
1,47 -2,90	Tidak Ada Autokorelasi
>2,91	Ada Autokorelasi

Tabel Uji Multikoloneritas**Coefficients^a**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	.068	.005		14.593	.000		
	PAD	5.895E-13	.000	.899	10.138	.000	.471	2.125
	DAU	1.225E-15	.000	.008	.070	.944	.271	3.684
	DAK	-4.696E-13	.000	-.371	-3.761	.000	.381	2.625
	Belanja Modal	-5.787E-14	.000	-.124	-1.223	.225	.360	2.777

a. Dependent Variable: KKPD

Tabel Uji Heterokedasitas**Coefficients^a**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	.003	.001		4.696	.000
	PAD	2.340E-15	.000	.046	.305	.761
	DAU	7.146E-16	.000	.062	.309	.758
	DAK	-2.036E-14	.000	-.208	-1.234	.220
	Belanja Modal	2.227E-16	.000	.006	.036	.972

a. Dependent Variable: absurd